



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **M. YUNUS SYAM**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **157105**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.734.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 5808 m²/500 m² di KAB / KOTA PASER, WARISAN Rp. 4.404.000.000
2. Tanah Seluas 1200 m² di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m²/48 m² di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
8. Tanah Seluas 401 m² di KAB / KOTA PASER, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **312.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



2. MOTOR, YAMAHA NMAX B6H-F A/T / SPD MTR SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 279.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 108.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 22.714.691

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.176.714.691

III. HUTANG Rp. 98.730.986

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.077.983.705

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.